

SIARAN PERS

NOMOR: HM.02.07/1/2024

Jakarta, 9 Januari 2024

Tentang

Arsip Statis 20 Surat Pencatatan Ciptaan 20 Kekayaan Intelektual Duta Arsip Rieke Diah Pitaloka Diserahkan ke ANRI

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Duta Arsip Indonesia, Rieke Diah Pitaloka menyerahkan arsip 20 surat pencatatan kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip diterima secara simbolis oleh Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C lantai 2, ANRI.

Menurut Imam, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional tidak hanya mengelola arsip statis yang berasal dari kementerian/lembaga, perusahaan, organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, tetapi juga dari perseorangan yang memiliki nilai guna sekunder berskala nasional. "Sekarang sudah ada total 132 arsip perseorangan yang dikelola ANRI. Ibu Rieke ini yang ke-133. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rieke yang telah berkenan menyerahkan arsip hasil karya intelektualnya kepada negara melalui ANRI. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh arsip pribadi lain milik Ibu Rieke yang juga memiliki nilai guna kelak untuk generasi penerus bangsa," ucap Imam.

Pada kesempatan yang sama, Rieke mengatakan bahwa penyerahan arsip statis 20 surat pencatatan ciptaan kepada ANRI terinspirasi dari *road map* pertama kebijakan pembangunan Indonesia, yaitu Pola Pembangunan Semesta Berencana atau PPNSB. Road map ini telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) pada 17 November 2023.

"PPNSB bagi saya merupakan antitesa sekaligus sintesa dari konsep negara federal yang dipaksakan pemerintah Belanda terhadap Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar," ucap Rieke. Menurutnya, PPNSB menggambarkan nasionalisme, persatuan, identitas dan jati diri bangsa dalam mewujudkan strategi pembangunan nasional secara sistematis yang berlaku secara nasional, dalam konteks geopolitik dan geoekonomi. "Semoga gagasan intelektual ini menjadi sumbangsih bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," harap Rieke di akhir acara.

Pada kesempatan ini turut hadir pula Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Min Usihen, Penasihat ANRI Bidang Pertahanan dan kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie, Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Mukhlis PaEni. Sebagai informasi, berikut adalah daftar surat pencatatan ciptaan 20 kekayaan intelektual yang diserahkan Rieke kepada ANRI:

1. Kekuasaan Negara di Era Digital;
2. Rekonstruksi Genesis Data Birokrat dan Data Warga;
3. Norma Yuridis Pendataan Perdesaan *Top Down*: Reproduksi Pseudo Data;
4. Norma Sosiologis Pendataan;
5. Aktor, Arena, serta Meta Kapital Data Birokrat Versus Data Warga;
6. Arena Birokrasi pada Pendataan Perdesaan *Top Down*;
7. Arena Warga pada Pendataan;
8. Kekerasan Simbolik Versus Afirmasi Simbolik;
9. *Alur Pseudo Public Policy*;
10. Alur Kebijakan Publik yang Presisi;
11. *The Vicious Circle* Kebijakan Rekolonialisasi;
12. *The Truth Circle* Kebijakan Afirmatif;
13. Sistemik Kebijakan Berbasis Data Presisi;
14. Norma Yuridis Pendataan Perdesaan Presisi;
15. Kebijakan Pemetaan, Pencegahan dan Penanganan Stunting Berbasis Data Presisi;
16. Sistem Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi;
17. Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Data Presisi;
18. Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Data Presisi;
19. Sistem Pemerintahan Daerah Kota Berbasis Data Presisi;
20. Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Data Presisi.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Biro Perencanaan dan Humas ANRI
Email: humas@anri.go.id